

PENGARUH INFRASTRUKTUR, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP PDRB DI JAWA TENGAH TAHUN 2004-2018

INFLUENCE OF INFRASTRUCTURE, GOVERNMENT EXPENDITURE AND INVESTMENT OF GRDP IN CENTRAL JAVA 2004-2018

¹⁾Wenny Inta Rosalia, ²⁾Lorentino Togar Laut, ³⁾Rian Destiningsih

^{1,2,3)}Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

wennyir1505@gmail.com

Abstrak

Pembangunan nasional didukung oleh pertumbuhan pada sektor masing-masing yang menciptakan pertambahan pada nilai perekonomian di suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mampu ditingkatkan melalui pengembangan ekonomi pada suatu daerah yang dijalankan dengan cara melakukan peningkatan pada pengembangan potensial yang dimiliki daerah masing-masing. PDRB di Provinsi Jawa Tengah periode 2004-2018 lebih kecil apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis keterkaitan infrastruktur, pengeluaran pemerintah, dan investasi terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah Periode 2004-2018. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Analisis data yang digunakan merupakan analisis Regresi Linear Berganda *time series* periode 2004-2018. Hasil uji t menunjukkan bahwa infrastruktur, pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif secara parsial terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah periode 2004-2018. Dan hasil uji F menunjukkan bahwa infrastruktur, pengeluaran pemerintah dan investasi secara bersamaan mempunyai pengaruh signifikan dengan PDRB di Provinsi Jawa Tengah periode 2004-2018.

Kata Kunci : Infrastruktur, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, PDRB.

Abstract

National development is supported by growth in each sector which creates an increase in the economic value in a region. Gross Regional Domestic Product (GRDP) is able to increase through economic development in areas that are driven by increasing the potential development of each region. GRDP of Central Java Province year 2004-2018 is lower compared to West Java, East Java and Jakarta Provinces. The purpose of this study to analyze the influence of infrastructure, government expenditure and investment towards GRDP in Central Java Province year 2004-2018. This research is a type of quantitative research. The analysis of the data used is Multiple Linear Regression analysis of the time series of the year 2004-2018. The t-test results showed that infrastructure, government expenditure and investment partially positive effect towards GRDP in Central Java Province year 2004-2018. And F test results indicated that infrastructure, government expenditure and investment together had a significant influence towards GRDP in Central Java Province year 2004-2018.

Keywords : Infrastructure, Government Expenditure, Investment, GRDP.

PENDAHULUAN

Pada umumnya pembangunan menggambarkan proses multidimensi yang mencakup peralihan pada struktur sosial, peralihan pada perilaku masyarakat dan peralihan pada lembaga nasional. Meningkatkan taraf hidup masyarakat, berkurangnya ketidak seimbangan pendapatan serta memerangi kemiskinan merupakan harapan dari suatu pembangunan. Menurut Todaro (2011 : 84) berpendapat bahwa perlunya tiga hal pokok guna menggapai tujuan yang difokuskan yaitu dengan cara memaksimalkan ketersediaan serta pendistribusian kebutuhan pokok untuk masyarakat, memajukan kualitas hidup masyarakat dan juga memajukan kapabilitas masyarakat dalam menjalani kegiatan sosial ataupun ekonomi di dalam kehidupannya Suparmoko dalam Hariani (2017 : 56) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu usaha guna memajukan taraf hidup masyarakat yang seringkali diukur dari tingkat pendapatan riil perkapita. Makna dari pembangunan ialah cara yang dilakukan untuk menaikkan PDB pada taraf nasional serta PDRB pada taraf daerah. Dalam proses pembangunan suatu negara, perencanaan pembangunan mempunyai peran yang sangat penting. Pedoman bagi prosedur

pembangunan supaya berjalan kearah tujuan yang hendak diraih disamping sebagai dasar dari ukuran keberhasilan suatu proses pembangunan yang dilaksanakan merupakan salah satu fungsi perencanaan.

Sebagai wujud dari implementasi pembangunan nasional, pembangunan ekonomi daerah juga ikut andil atas keberhasilan suatu pembangunan secara menyeluruh. Tiap-tiap provinsi yang berada di Indonesia termasuk juga Provinsi Jawa Tengah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mencapai sasaran perencanaan ekonomi dan juga dapat menangani permasalahan pembangunan yang timbul terpenting pada era otonomi daerah dimana pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk menata serta memelihara sendiri urusan pemerintahannya. Dengan demikian pemerintah daerah bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu pemerintah otonom terus berupaya menggerakkan berbagai potensi ekonomi di wilayahnya. Pelaku ekonomi mampu berperan dan juga berpartisipasi secara aktif, keadaan ini dilakukan supaya mampu mendorong perekonomian sehingga dapat

memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Pulau Jawa Periode 2011-2018 (Milyar Rupiah)

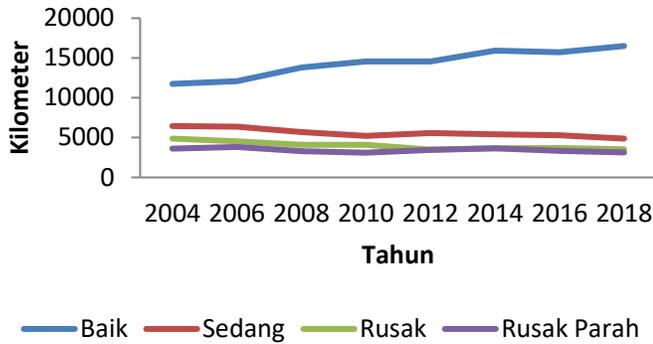
Tahun	Provinsi					
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2011	1.147.558	965.622	656.268	68.049	1.054.401	290.545
2012	1.222.527	1.028.409	691.343	71.702	1.124.464	310.385
2013	1.296.694	1.093.543	726.655	75.627	1.192.789	331.099
2014	1.373.389	1.149.231	764.959	79.532	1.262.697	349.205
2015	1.454.102	1.207.001	806.765	83.461	1.331.418	367.959
2016	1.539.916	1.275.619	849.099	87.685	1.350.564	387.835
2017	1.635.366	1.343.864	893.750	93.302	1.422.690	410.045
2018	1.736.195	1.419.689	941.283	98.026	1.502.641	433.884

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2012-2019

Dapat dilihat pada tabel 1 bahwa perekonomian di Pulau Jawa selama periode 2011-2018 mengalami peningkatan. Nilai PDRB yang tidak sama ini diakibatkan karena setiap provinsi mempunyai potensi ekonomi yang berbeda sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Semua provinsi di Pulau Jawa mengalami peningkatan PDRB, namun apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, PDRB Provinsi Jawa Tengah berada pada posisi ketiga terendah.

PDRB yang meningkat tidak dapat lepas dari pembangunan infrastruktur. Bergeraknya sektor riil, penyerapan tenaga kerja dan menyebabkan kegiatan produksi serta mampu mendorong minat investasi merupakan tujuan dari pembangunan infrastruktur. Infrastruktur jalan merupakan infrastruktur yang dapat dipakai oleh

berbagai kalangan masyarakat. Dengan dibangunnya fasilitas infrastruktur jalan, maka akan memudahkan proses pendistribusian barang maupun jasa. Dapat dilihat pada gambar 1 bahwa kondisi panjang jalan yang baik di Provinsi Jawa Tengah hampir setiap tahunnya mengalami kenaikan karena infrastruktur jalan merupakan hal penting, sehingga diperlukan adanya infrastruktur jalan dalam kondisi yang baik untuk memudahkan akses masyarakat ke wilayah yang ada didekatnya serta guna memperlancar arus pendistribusian barang maupun jasa. Akan tetapi kondisi jalan rusak parah masih saja mengalami angka yang fluktuasi meskipun mulai tahun 2015 terus mengalami penurunan hingga tahun 2018.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dalam angka periode 2005-2019

Gambar 1. Kondisi Panjang Jalan di Provinsi Jawa Tengah periode 2005-2018

Kebijakan fiskal berperan sebagai salah satu strategi yang diimplementasikan oleh pemerintah atas pendapatan dan pengeluaran guna menggapai target seperti pertumbuhan ekonomi. Salah satu jenis dari kebijakan fiskal yaitu pengeluaran pemerintah dimana merupakan suatu kegiatan yang memiliki sasaran untuk mengontrol kegiatan perekonomian melalui penentuan besar penerimaan juga pengeluaran pemerintah di tiap tahunnya dimana hal tersebut diatur dalam APBN pada taraf nasional dan APBD pada taraf daerah.

Tabel 2. Realisasi Anggaran Pendapatan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011-2018 (Milyar Rupiah)

Tahun	Total Pengeluaran	Pengeluaran Pemerintah	
		Pengeluaran Rutin	Pengeluaran Pembangunan
2011	8.786.746	6.382.113	2.404.633
2012	11.128.807	8.540.010	2.588.797
2013	12.724.777	9.586.845	3.137.932
2014	15.086.065	11.117.699	3.968.366

2015	17.820.761	12.690.256	5.130.505
2016	19.354.375	14.045.265	5.309.110
2017	22.884.713	18.048.855	4.835.858
2018	24.478.633	18.754.175	5.724.458

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dalam angka periode 2012-2019

Dapat disimpulkan dari tabel 2 bahwa pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya akan tetapi pengeluaran pembangunan memiliki presentase nilai yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pengeluaran rutin yang masih mendominasi anggaran belanja daerah. Padahal dengan cara meningkatkan pengeluaran pembangunan, maka akan menciptakan infrastruktur yang baik dan dengan terciptanya infrastruktur yang baik maka mampu meningkatkan nilai investasi sehingga mengakibatkan PDRB juga mengalami peningkatan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat investasi dan PDRB memiliki hubungan yang berkaitan. Menurut Rudibdo dan Hadi Sasana (2017:216) menerangkan bahwa usaha guna menaikkan perekonomian maka tiap daerah wajib mengaktualkan iklim yang mampu membangkitkan investasi. Apabila investasi mengalami kenaikan maka akan menaikkan pula tingkat PDRB. Dapat dilihat dari tabel 3 bahwa nilai PMA di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 dan 2014 mengalami kenaikan yang cukup tinggi,

kenaikan tersebut diakibatkan karena adanya perpindahan pada beberapa sektor industri ke Jawa Tengah dan adanya pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol Semarang-Solo. Tahun 2015 PMA mengalami penurunan disebabkan oleh perlambatan pada sisi lapangan usaha. Sementara perlambatan pada kegiatan usaha yang disebabkan oleh menurunnya permintaan domestik mengakibatkan PMDN tahun 2013 mengalami depresiasi, seterusnya pada tahun 2014 hingga 2016 terus mengalami kenaikan dikarenakan adanya perpindahan beberapa industri pengolahan ke Provinsi Jawa Tengah.

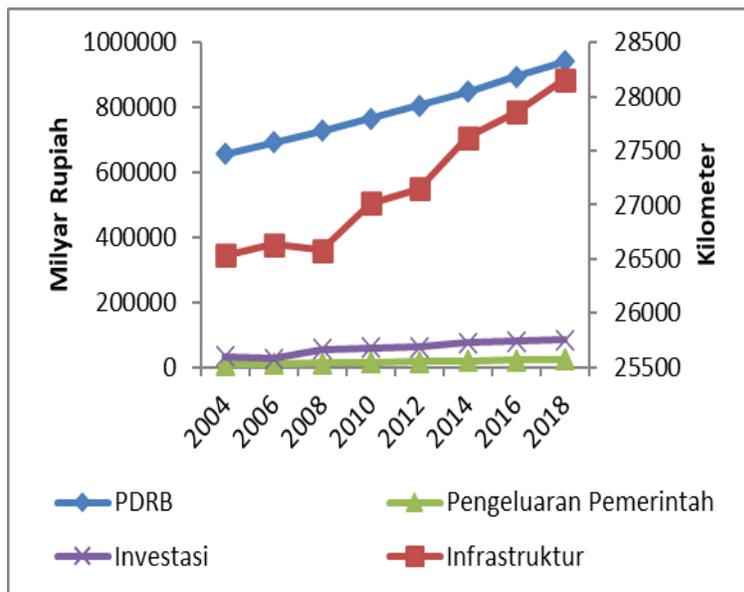
Tabel 3. Investasi di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011-2018 (Milyar Rupiah)

Tahun	Investasi		Total Investasi
	PMA	PMDN	
2011	12.129.660	21.374.410	33.504.070
2012	12.736.216	14.393.196	27.129.412
2013	41.872.140	12.356.337	54.228.477
2014	47.294.360	13.061.188	60.355.546
2015	42.653.730	19.890.062	62.543.792
2016	50.838.698	24.070.352	74.909.050
2017	54.459.596	25.866.012	80.325.608
2018	56.147.277	27.474.893	83.622.170

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dalam angka periode 2012-2019

Infrastruktur, pengeluaran pemerintah dan investasi mempunyai pengaruh terhadap PDRB dimana setiap terjadi kenaikan maka akan menaikkan tingkat PDRB hal tersebut dapat dicermati pada gambar 2 yang

memaparkan tentang perkembangan PDRB, infrastruktur, pengeluaran pemerintah dan investasi pada Provinsi Jawa Tengah periode 2004-2018. Peningkatan infrastruktur berpengaruh dengan kenaikan PDRB, meskipun pada tahun 2013 infrastruktur mengalami penurunan namun sejak tahun 2014 infrastruktur mengalami kenaikan hingga tahun 2018. Pengeluaran pemerintah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang memiliki dampak yang positif pada kenaikan PDRB. Begitu pula dengan kenaikan pada tingkat investasi yang mampu mendorong kemajuan PDRB.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dalam angka periode 2005-2019

Gambar 2. Perkembangan PDRB, Infrastruktur, Pengeluaran Pemerintah, dan Investasi di Provinsi Jawa Tengah periode 2005-2018

METODOLOGI PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Bentuk penelitian ini ialah deskriptif kuantitatif yang menggunakan metode analisis regresi *time series*. Data yang ada ialah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Variabel bebasnya yaitu data infrastruktur, pengeluaran pemerintah dan investasi dari tahun 2004 sampai 2018 di Provinsi Jawa Tengah dan variabel terikatnya meliputi data PDRB di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2018.

Teknik Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Guna mengetahui model regresi baik atau tidak sehingga untuk mengetahuinya dapat diselesaikan dengan uji asumsi klasik. Menurut Ghozali (2013:105) berpendapat bahwa dalam uji asumsi klasik mengandung tujuan untuk menyampaikan keyakinan bahwa persamaan regresi yang diterima merangkum akurasi dalam estimasi, konsisten, tidak bias, serta dimanfaatkan untuk melihat apakah model estimasi yang dibuat tidak beralih arah dengan varian minimum agar diuji estimator bersifat BLUE maka hendaklah dilakukan uji asumsi klasik.

Analisis Regresi Linier Berganda

Model persamaan regresi linier berganda dinotasikan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 \text{Log}X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

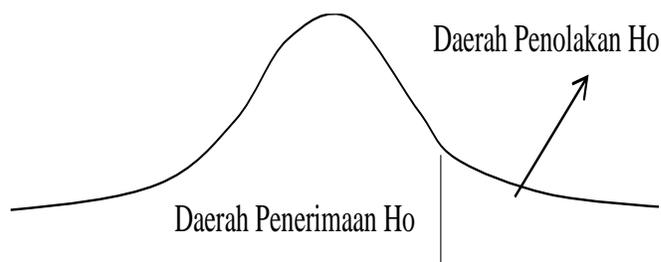
Keterangan :

Y	=	PDRB
a	=	Konstanta
b_1, b_2, b_3	=	Koefisien regresi
$\text{Log}X_1$	=	Infrastruktur
X_2	=	Pengeluaran pemerintah
X_3	=	Investasi
e	=	<i>term error</i>

Uji Statistik

Uji t-statistik

Pada umumnya pengujian ini mampu menginterpretasikan seberapa jauh hubungan variabel bebas sebagai individu dalam menjelaskan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2011:81). Uji t statistik berperan untuk menyadari apakah ada kaitan antara variabel bebas selaku individu dengan variabel terikat dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.

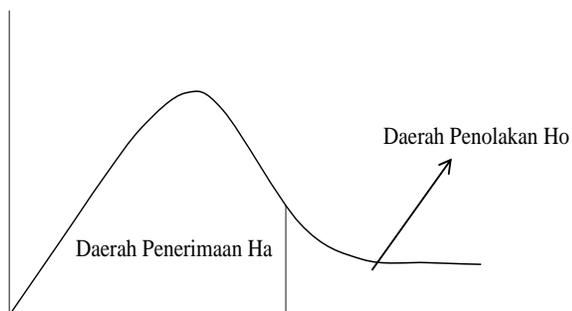


Gambar 3. Penolakan dan Penerimaan Ho

Uji F-statistik

Pengujian ini bertujuan untuk menguji variabel secara bersamaan dengan menggunakan pengujian signifikansi secara

keseluruhan guna memprediksi garis yaitu apakah variabel bebas berkorelasi atau berhubungan secara linier terhadap variabel terikat secara simultan (bersamaan). Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka memiliki arti bahwa variabel bebasnya secara keseluruhan memiliki pengaruh dengan variabel terikat.



Gambar 4. Penolakan H_0 dan Penerimaan H_a

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini memiliki tujuan guna menghitung seberapa besar variasi variabel terikat dapat diuraikan oleh variabel bebas. Batasan nilai R^2 yaitu berkisar $0 \leq R^2 \leq 1$ yang mempunyai arti bahwa apabila R^2 bernilai 1 maka 100% variasi variabel terikat dapat diuraikan oleh variabel bebas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian ini bermaksud untuk mengetahui kenormalan pada model regresi apakah variabel memiliki distribusi normal atau tidak. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa nilai probabilitas

Jarque-Bera sebesar 1.278230 dengan probabilitas sebesar $0.527759 > (\alpha = 5\%)$ maka bisa disebutkan bahwa data yang dipakai memiliki distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bermaksud digunakan untuk menemukan interaksi antar variabel bebas. Berdasarkan hasil pengujian, nilai VIF variabel infrastruktur, pengeluaran pemerintah dan investasi yaitu dibawah 10, maka tidak timbul multikolinearitas pada variabel tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bermaksud untuk mengetahui apakah terjadi persamaan variasi. Berdasarkan uji, nilai Prob. Chi-Squared sebesar 0.4588 yang berarti lebih dari $\alpha = 5\%$ sehingga H_0 diterima dan tidak timbul heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Pengujian ini bermaksud digunakan untuk menguji hubungan pada persamaan regresi. Berdasarkan uji, nilai probabilitas Chi-Squared adalah sebesar $0.4469 > (\alpha = 5\%)$ maka dapat dikatakan bahwa model tersebut tidak mengalami gejala autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Hasil Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG_X1	0.009681	0.003121	3.102210	0.0101
X2	0.045938	0.023840	1.926959	0.0802
X3	0.225486	0.043939	5.131819	0.0003
C	2.181247	0.044494	49.02330	0.0000

Sumber : Data diolah dengan Eviews 10

Persamaan regresi linier berganda berdasarkan tabel 7 dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = 2.18 + 0.01X_1 + 0.04X_2 + 0.2X_3 + e$$

Hasil dari estimasi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Konstanta bernilai 2.18 menjelaskan bahwa jika variabel independen yaitu infrastruktur, pengeluaran pemerintah dan investasi bernilai konstan maka PDRB sebesar 2.18. Hal ini berarti bahwa apabila variabel independen nilainya konstan maka nilai variabel PDRB sebesar Rp. 2.18.
2. Koefisien regresi infrastruktur (X1) sebesar 0.01, artinya variabel pengeluaran pemerintah dan investasi tetap apabila infrastruktur rata-rata sebesar 1 km, maka PDRB rata-rata meningkat sebesar Rp. 0.01
3. Koefisien regresi pengeluaran pemerintah (X2) sebesar 0.04, artinya variabel infrastruktur dan investasi tetap apabila pengeluaran pemerintah rata-

rata sebesar Rp. 1, maka PDRB rata-rata meningkat sebesar Rp. 0.04.

4. Koefisien regresi investasi (X3) sebesar 0.2, artinya variabel infrastruktur dan pengeluaran pemerintah tetap apabila investasi rata-rata sebesar Rp. 1, maka PDRB rata-rata meningkat sebesar Rp. 0.2.

Uji Statistik

Uji t-statistik

Tabel 5. Hasil uji t

Variable	t-Statistic	Prob.	t-tabel
LOG_X1	3.10221	0.0101	1.782
X2	1.92696	0.0802	1801.782
X3	5.13182	0.0003	1.782

Sumber : Data diolah dengan Eviews 10

Uji F-statistik

Tabel 6. Hasil Uji F

F-statistic	.4767
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Data diolah dengan Eviews 10

Dari hasil pengujian F diperoleh hasil F hitung 180.4767 > F tabel yaitu 3.59, dengan nilai probabilitasnya 0.000000 < 0.05. Maka dapat diartikan bahwa variabel infrastruktur, pengeluaran pemerintah dan investasi secara bersamaan memiliki pengaruh dengan PDRB di Provinsi Jawa Tengah.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Adjusted R-squared	0.974657
--------------------	----------

Sumber : Data diolah dengan Eviews 10

Dari hasil regresi diperoleh nilai R^2 sejumlah 0.974657 yang dapat diartikan bahwa PDRB dapat dijelaskan oleh variasi model infrastruktur, pengeluaran pemerintah dan investasi sebesar 97.46% dan sisanya 2.54% diterangkan variabel yang lain diluar model.

Pembahasan

Pengaruh Infrastruktur Terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah Periode 2004-2018

Sesuai hasil perhitungan analisis data, diperoleh t hitung sebesar $3.1022 > t$ tabel yaitu 1.796, yang berarti terdapat pengaruh positif serta signifikan dari infrastruktur dengan PDRB di Jawa Tengah tahun 2004-2018.

Infrastruktur yang diteliti berfokus pada panjang jalan umum di Provinsi Jawa Tengah. Menurut Keusuma dan Suriani (2015:16) yang menyatakan bahwa dengan diberlakukannya desentralisasi jalan sehingga pemerintah daerah mempunyai otoritas lebih untuk memperbaiki hingga membangun jalan pada suatu daerah, maka jalan mempunyai peran positif terhadap

pembentukan kuantitas serta kualitas yang memiliki dampak terhadap kenaikan PDRB.

Jalan termasuk dalam suatu prasarana yang penting pada transportasi darat. Karena fungsinya yang strategis, yaitu berfungsi sebagai penghubung antar daerah. Jalan juga menjadi penghubung antara daerah pemasaran dengan sentra-sentra produksi, manfaat jalan memiliki dampak yang kuat dalam rangka menumbuhkan perekonomian pada suatu wilayah. Hal ini sejalan dengan keadaan jalan di Provinsi Jawa Tengah, dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan yang dapat memperlancar kegiatan distribusi barang dan jasa sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah Periode 2004-2018

Sesuai hasil perhitungan analisis data, diperoleh t hitung sebesar $1.9269 > t$ tabel yaitu 1.796, yang berarti terdapat pengaruh positif serta signifikan dari pengeluaran pemerintah dengan PDRB di Jawa Tengah tahun 2004-2018.

Penelitian ini sama dengan penelitian dari Ratih, dkk (2017:51) yang mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah menunjukkan hasil positif dan signifikan

terhadap PDRB. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Mutia, dkk (2019:123) yang menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah dengan PDB. Pengeluaran pemerintah bersumber dari semua pemasukan daerah yang diterima dari daerahnya sendiri maupun dari bantuan pemerintah pusat yang kemudian digunakan membiayai semua kegiatan pada suatu daerah.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menaikkan PDRB, karena melingkupi dalam penyediaan kebutuhan publik serta pelayanan terhadap masyarakat yang tidak dihadirkan atas pihak swasta. Peran ini tertulis pada pengeluaran pemerintah yaitu anggaran belanja pemerintah yang tiap tahunnya selalu dilaporkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat setimpal dengan kecakapan mengumpulkan pendapatan daerah dalam rangka menjunjung terwujudnya perekonomian yang berlanjut. Melalui kebijakan pengeluaran pemerintah, pemerintah daerah berhasil memajukan sumberdaya manusia lewat kualitas kesehatan, pendidikan dan perluasan kesempatan kerja atau usaha serta

penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Investasi Terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah Periode 2004-2018

Sesuai hasil perhitungan analisis data, diperoleh t hitung sebesar $5.1318 > t$ tabel yaitu 1.796 , yang berarti terdapat pengaruh positif serta signifikan dari investasi dengan PDRB di Jawa Tengah tahun 2004-2018.

Penelitian ini sama dengan penelitian dari Maisaroh dan Havid (2018:217) yang mengatakan bahwa investasi memiliki hasil positif dan signifikan terhadap PDRB. Hampir semua ahli ekonomi menegaskan pentingnya arti investasi sebagai suatu aspek dan penentu utama pertumbuhan ekonomi. Pada satu sisi investasi menggambarkan permintaan efektif dan dilihat pada sisi lain mencerminkan kapabilitas penawaran menciptakan ketepatan produktif bagi produksi di masa yang akan datang.

Pembentukan modal atau investasi menjadi satu hal yang sangat krusial dalam menggarangkan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah, dengan datangnya investasi di Provinsi Jawa Tengah akan menangani kurangnya modal yang terjadi di wilayah dengan tingkat perekonomian yang masih rendah. Dengan semakin meningkatnya

investasi di Provinsi Jawa Tengah, maka dapat mendorong serta memperlancar proses pertumbuhan PDRB. Selama periode penelitian 2004-2018 investasi di Provinsi Jawa Tengah telah berhasil mendorong kenaikan output secara signifikan dan otomatis telah membuka banyak lowongan pekerjaan dan juga meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari naiknya pendapatan masyarakat.

Pengaruh Infrastruktur, Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah Periode 2004-2018

Berdasarkan uji F terkait dengan infrastruktur, pengeluaran pemerintah dan investasi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2018 menunjukkan nilai F hitung $> F$ tabel yaitu $180.4767 > 3.59$ maka infrastruktur, pengeluaran pemerintah dan investasi yang secara bersamaan berpengaruh signifikan dengan PDRB di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2018.

Penelitian ini sama dengan penelitian dari Putri (2014:119) bahwa infrastruktur, pengeluaran pemerintah dan investasi secara bersamaan memiliki pengaruh signifikan dengan PDRB. Sejak diterapkannya otonomi daerah, maka setiap daerah saling memperbaiki diri guna menaikkan pendapatannya dengan cara memanfaatkan semua kapasitas yang dimiliki secara

optimal sehingga dapat mendatangkan pendapatan.

Pertumbuhan PDRB tidak lepas dari peranan kontribusi oleh infrastruktur, pengeluaran pemerintah dan investasi. Dengan diberlakukannya desentralisasi maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki otoritas yang lebih jauh untuk membangun serta memperbaiki jalan rusak. Melalui kebijakan belanja daerah, maka pemerintah selalu berupaya menyediakan barang publik yang tidak mampu disediakan oleh swasta. Investasi mempunyai peran yang penting dalam upaya meningkatkan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah, disamping telah mendorong kenaikan output dan mendorong permintaan input, investasi juga mampu memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari naiknya pendapatan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa infrastruktur, pengeluaran pemerintah dan investasi secara bersamaan berpengaruh dengan PDRB.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan selama periode 2004-2018 bahwa variabel infrastruktur mempunyai pengaruh yang positif dengan PDRB di

Provinsi Jawa Tengah, dan pengaruh tersebut signifikan.

2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan selama periode 2004-2018 bahwa variabel pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang positif dengan PDRB di Provinsi Jawa Tengah, dan pengaruh tersebut signifikan.
3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan selama periode 2004-2018 bahwa variabel investasi mempunyai pengaruh yang positif dengan PDRB di Provinsi Jawa Tengah, dan pengaruh tersebut signifikan.
4. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan selama periode 2004-2018 bahwa variabel infrastruktur, pengeluaran pemerintah dan investasi secara bersamaan berpengaruh dengan PDRB di Provinsi Jawa Tengah.

SARAN

1. Infrastruktur yang dilihat dari panjang jalan dalam memastikan pembangunan dan juga pembetulan pada suatu daerah wajib dilaksanakan dengan cermat serta tepat. Hal ini dikarenakan, setelah diberlakukannya desentralisasi, maka tiap-tiap daerah mengarah pada peningkatan pembangunan jalan melalui penggalan potensi pada tiap daerah

untuk mengisi nilai pembangunan tersebut, akan tetapi kurang memperhatikan perawatan kondisi jalan sehingga mengakibatkan jumlah jalan rusak dan rusak berat masih fluktuatif. Dalam hal ini, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan peraturan tentang tertib lalu lintas untuk pengguna atau pemakai jalan mengenai berapa beban maksimal kendaraan yang dapat melintasi jalan supaya kondisi jalan di Provinsi Jawa Tengah dapat dipertahankan.

2. Pengeluaran pemerintah yang terus naik setiap tahunnya diharapkan dapat dialokasikan secara seimbang antara pengeluaran rutin yang cenderung lebih konsumtif dengan pengeluaran pembangunan yang lebih berpihak terhadap kepentingan publik. Perlunya pengawasan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengalokasian dana, supaya pengeluaran pemerintah mampu meningkatkan PDRB di Provinsi Jawa Tengah dengan mendistribusikan dana pada sektor-sektor yang lebih produktif.
3. Investasi yang terus meningkat diharapkan juga mampu meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui kebijakan penanaman modal yang tidak

merugikan masyarakat dan kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan hidup supaya pembangunan yang terlaksana berkesinambungan pada peningkatan kesejahteraan manusia.

4. Berdasarkan hasil dari penelitian, pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu terus menjaga dan mengupayakan supaya PDRB tetap meningkat guna mensejahterakan kehidupan masyarakat. Salah satunya dengan terus mengevaluasi peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Atmaja, Harry Kurniadi dan Kasyful Mahalli. 2015. Pengaruh Peningkatan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Sibolga. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 3, No. 4. Hal 1-18.

Dandan, Mwafaq M. 2011. Government Expenditures and Economic Growth in Jordan. *International Conference on Economics and Finance Research IPEDR* Vol. 4. Hal 467-471.

Ghozali, Imam. 2013. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika : Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 8. Terjemahan Rochajat Harun*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Juliyansyah, Romi dkk. 2018. The Influence Of Investment, Government Expenditure and Labors on Economic Growth in Aceh Province. *Jurnal*

Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia. Vol. 3, No. 1. Hal 59-76.

Keusuma, Cut Nanda dan Suriani. 2015. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal ilmiah ekonomi dan pembangunan*. Vol. 4, No. 1. Hal 1-18.

Kuncoro, Mudrajat. 2011. *Metode Kuantitatif*. Yogyakarta: STIM YKPN.

Maisaroh, Mamai dan Havid Risyanto. 2017. Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 1, No.2. Hal 206-221.

Mutia, Kinanti Asa, dkk. 2019. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2004-2018. *DINAMIC : Directory Journal of Economic*. Vol. 1, No. 1. Hal 114-126.

Palilu, Aram. 2018. Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Transportasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Ambon. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*. Vol. 23, No. 2. Hal 227-240.

Putri, Phanny Ineke. 2014. Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Belanja Modal, Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa. *Journal of Economics and Policy*. Vol. 7, No. 2. Hal 109-120.

Ratih, GAPA, dkk. 2017. Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat

- Kemiskinan Pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol. 6, No. 1. Hal 29-54.
- Rudibdo dan Hadi Sasana. 2017. Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Investasi, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Eks-Karasidenan Semarang Pada Era Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*. Vol 2, No. 2. Hal 215-226.
- Saidi, Samir, dkk. 2018. The long-run relationship between transport energy consumption, transport infrastructure, and economic growth in MENA countries. *Transportation Research*. Vol 111. Hal 78-95.
- Skorobogatova, Oksana dan Irina Kuzmina Merlino. 2017. Transport Infrastructure Development Performance. *Procedia Engineering*. Vol 178. Hal 319-329.
- Sumadiasa, I Ketut, dkk. 2016. Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan, Listrik Dan PMA Terhadap Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Tahun 1993-2014. *E-Jurnal EP Unud*. Vol. 5, No. 7. Hal. 925-947
- Todaro, Michael. 2011. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Wijayanto, Anton Tri. 2016. Analisis Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000-2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 16, No. 02. Hal 418-428.